

**PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI  
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
(STUDY KASUS DI DESA SINDON KECAMATAN NGEMPLAK  
KABUPATEN BOYOLALI)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam

Oleh:

Mirza Iskandar Putra  
I000130024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

# **HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGELOLAAN DANA DESA  
UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
(STUDY KASUS DI DESA SINDON KECAMATAN NGEMPLAK  
KABUPATEN BOYOLALI)**

Oleh:

**Mirza Iskandar Putra**

**NIM: I000130024**

**NIRM: 13/X/02.1.2/0024**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Dr. M. Muhtarom, MH.**

## HALAMAN PENGESAHAN

**PENGELOLAAN DANA DESA  
UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
(STUDY KASUS DI DESA SINDON KECAMATAN NGEMPLAK  
KABUPATEN BOYOLALI)**

Oleh :

**Mirza Iskandar Putra**

**NIM: I000130024**

**NIRM: 13/X/02.1.2/0024**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 11 Oktober 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

### Dewan Penguji

1. **Dr. M. Muhtarom, MH.**

(Ketua Dewan Penguji)

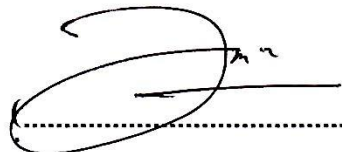
2. **Yayuli, S.Ag.,M.PI.**

(Anggota I Dewan Penguji)

3. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**


(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Dekan,

()  
(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan diatas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Oktober 2017

Penulis



**Mirza Iskandar Putra**  
I000130024

**PENGELOLAAN DANA DESA  
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
(STUDY KASUS DI DESA SINDON  
KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI)**

**ABSTRAK**

Desa, atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang yuridikasi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang diajukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan menggunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sindon dan pengelolaan tersebut apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah atau belum dan bagaimana pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari hasil dokumen-dokumen Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), wawancara dengan Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes dan para peminjam BUMDes "Sejahtera" Desa Sindon. Analisis data menggunakan metode analisis evaluatif yang menggambarkan tentang pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes "Sejahtera" selanjutnya memberikan penilaian menurut hukum ekonomi syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Sejahtera" Desa Sindon adalah sebuah alternatif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini serupa dengan model yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan mendirikan Grameen Bank atau Bank Desa yang mengembangkan konsep kredit mikro untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari Bank umum.

Dalam penelitian ini Pengelolaan Dana Desa sebagian besar dibelanjakan untuk pengadaan infrastruktur Desa seperti : pembangunan gedung serbaguna, pembangunan jalan, pembuatan parit, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Hanya sebagian kecil digunakan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa menggunakan sistem simpan pinjam secara konvensional bukan syari'ah. Karena setiap peminjam dana BUMDes dikenakan bunga sebesar 1,25% per bulan atau setiap kali angsuran. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah bunga pinjaman tersebut termasuk dalam kategori riba, hal ini juga tentu adanya unsur kezaliman karena besaran bunga yang mencapai 15% setiap tahun. Sehingga kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.

Seharusnya dalam pengelolaan BUMDes lebih ditingkatkan kinerja para pengurus yang tidak hanya memberikan modal usaha kepada masyarakat, tetapi mengupayakan usaha-usaha lain juga seperti pelayanan jasa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan tempat pelelangan ikan, pengembangan hasil industri, pengelolaan pariwisata dan lain-lain sesuai dengan program-program BUMDes.

**Kata Kunci : Dana Desa, Ekonomi Masyarakat, Hukum Ekonomi Syari'ah, Riba, Gharar, Maisir, Haram, Kezaliman.**

**THE MANAGEMENT OF VILLAGE  
FUND ON DEVELOPING OF COMMUNITY ECONOMIC  
BASED ON SYARI'AH ECONOMIC LAW'S PRESPECTIVE  
(CASE STUDY IN SINDON VILLAGE, NGEMPLAK  
SUBDISTRICT, BOYOLALI REGENCY)**

**ABSTRACT**

*Village, or based on Law No.32 of 2004 about local government is a legal community unity that has jurisdictional territorial boundaries, which is authorized to regulate and manage the interests of local communities based on the local origins and the customs. Village fund is used to finance community empowerment programs and activities that are proposed to increase the capacity and the capability of communities by using their own potential and resources.*

*The aims of this research is to find out the influences of the village fund to the community welfare of Sindon village and whether managing of village fund has appropriate with the syari'ah economic law's prespective and the management of the village fund through BUMDes. The type of this research is qualitative research by using descriptive approach. Data were obtained from the documents result of the village, village owned enterprises (BUMDes), interview with the government of village, the manager and the borrower of "Prosperous" BUMDes in Sindon village. The data analysis in this research is using evaluative analysis method which describes the management of the Village Fund through "Prosperous" BUMDes then can give assessment based on syari'ah economic law.*

*The result shows that the Village Fund Management through Village Owned Enterprise (BUMDes) "Prosperous" of Sindon village is an alternative way to develop their economic. It is same with Muhammad Yunus's model which is offered in Bangladesh to alleviate of poverty by establishing Grameen Bank or Village Bank which develop the concept of microcredit for poor entrepreneurs who are unable to borrow from public bank.*

*In this research, the Village Fund Management is mostly spent on the procurement of village infrastructure such as: multipurpose building construction, road construction, trench construction, bridge construction and others. Only a small part is used to develop their socio-economic. Conventional savings and loan system is used than syari'ah in the use of Village Fund Allocation. Because every borrower of BUMDes is charged an interest of 1.25% per month or each installment. According to Syari'ah Economic Law the interest of the loan is included in the category of usury, it also contains the element of tyranny because of the interest rate reaches 15% every year. So it is not appropriate with the principles of Syari'ah Economic Law.*

*The management of BUMDes should improve the performance of managers who not only provide business capital to the society, but also they strive for other efforts such as services, management of the village market, management of fish auction, development of industrial product and tourism potency, and others which is suitable with BUMDes programs.*

**Keywords:** *Village Fund, Community Economy, Syari'ah Economic Law, Riba, Gharar, Maisir, Haram, Zalim.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sepanjang masa, sebagian besar komunitas desa di Indonesia, dari daerah Aceh hingga Papua, telah didominasi oleh suatu kekuasaan pusat tertentu. Banyak diantaranya telah mengalami dominasi itu sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan tradisional, banyak yang mengalaminya sejak zaman penjajahan Belanda atau Inggris, dan banyak pula lainnya yang baru mengalaminya sejak beberapa waktu terakhir ini<sup>1</sup>.

Awal pelaksanaan otonomi daerah aspek kemandirian dan terkesan diabaikan, namun dengan seriusnya pemerintah pusat hingga kabupaten melaksanakan tugas otonomi daerah, kepentingan-kepentingan desa mulai diperhatikan. Bukti bahwa pemerintah pusat mulai memberikan titik berat pada prioritas pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa tercermin dari semakin banyaknya perangkat peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri dalam Negri (Permendagri) maupun keputusan Menteri Dalam Negri (Kepmendagri), yang mengatur tentang desa, baik itu PP, Permendagri dan Kepmendagri yang dimaksud merupakan peraturan pelaksanaan pengaturan mengenai desa yang diamanatkan oleh UU No 32 tahun 2004.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ***“Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Study Kasus di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali).***

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini adalah pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, yang nanti akan dikaitkan dengan perspektif hukum ekonomi syaria’ah.

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia* (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hlm. 16.

Agar permasalahan tersebut dapat dipahami secara lebih jelas dan mudah, maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut : Bagaimana pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat menurut pandangan hukum ekonomi syari'ah? dan Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Sejahtera" Desa Sindon?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan penelitian yang teruraikan dalam rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sindon dalam hal penunjang kesejahteraan ekonomi.
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat perspektif hukum ekonomi syari'ah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai "Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" belum ada, akan tetapi penelitian yang berkaitan memang sudah ada. Seperti skripsi-skripsi yang disusun dibawah ini :

1. Riska Yuliani 2012, Program Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali*".
2. Nova Sulastri, 2016 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari dalam skripsinya yang berjudul "*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana*".



*Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”.*

## **1.5 Kerangka Teoritik**

### **1.5.1 Pengertian Ekonomi Islam**

Istilah ekonomi Islam terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam merupakan penggabungan dari kata tersebut. Sebagian pakar ada yang tidak setuju memberi definisi ekonomi Islam, karena ekonomi Islam bersifat normatif. Mereka beralasan bahwa penamaan ekonomi Islam hanya memberi nilai-nilai dan roh Islam terhadap aktivitas ekonomi yang semestinya dilaksanakan<sup>2</sup>.

### **1.5.2 Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam**

Sumber hukum ekonomi Islam meliputi :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama ekonomi Islam, didalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum-hukum yang berkaitan tentang ekonomi.

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya terdapat khazanah aturan perekonomian Islam.

c. Ijtihad

Diantara produk ijtihad yaitu : kitab-kitab fiqh, baik bersifat umum yaitu kitab-kitab yang didalamnya terdapat bab tentang mu'amalah, maupun kitab-kitab fiqh khusus tentang ekonomi Islam, fatwa tentang Ekonomi Islam, seperti fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI), Putusan Pengadilan Agama tentang perkara Ekonomi Islam, Taqnin (Penyusunan

---

<sup>2</sup>Hulwati, Ekonomi Islam : “*Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*” (Jakarta: Ciputat Press, 2006,) hlm. 7-8

Undang-Undang) tentang Ekonomi Islam, Peraturan seperti Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), PBI (Peraturan Bank Indonesia), Permen (Peraturan Menteri) Keuangan tentang Ekonomi Islam dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), seperti Perma No. 8 Tahun 2008 tentang KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)

### **1.5.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Menurut M. Umar Chapra, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, prinsip ekonomi Islam, yaitu :<sup>3</sup> Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip perwakilan (khalifah), prinsip keadilan ('*adalah*'), prinsip tazkiyah, dan prinsip al-falah

### **1.5.4 Ciri-Ciri Ekonomi Islam**

Menurut Mahmud Muhammad Babilli, sebagaimana dikutip oleh Syukri Iska, beberapa ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu :<sup>4</sup> Ekonomi Islam ialah ekonomi ketuhanan yang bersaskan akidah dan akhlak. bumi yang luas ini bisa menampung semua manusia dengan memperoleh rezeki yang mencakup semua zaman, ekonomi yang berpijak di alam nyata dan realistis dan ekonomi Islam adalah ekonomi kemanusiaan sejagat.

### **1.5.5 Tujuan Ekonomi Islam**

Islam berorientasi pada tujuan (*goal-oriented*). Prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan negara bertujuan lebih mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam sistem ekonomi Islam, yakni :<sup>5</sup> Jaminan pemenuhan kebutuhan

---

<sup>3</sup>Neni Sri Imaniyati, *Perbankan*. hlm. 25-27

<sup>4</sup>Sukri Iska, *Sistem* (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012), hlm. 128-129.

<sup>5</sup>M. Ismail Yusanto dan M.Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor : Al-Azhar Press, cet 2, 2011), hlm. 69.

pokok, keadilan dalam peran serta ekonomi dan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan

#### **1.5.6 Etika Ekonomi Islam**

Menurut Heri Sudarsono, etika ekonomi Islam yaitu :<sup>6</sup> Keberadaan tuntunan Allah sebagai pusat kontrol setiap kegiatan ekonomi Islam, keseimbangan, baik dalam arti tidak berlebih-lebihan, dalam arti keadilan distribusi ataupun dalam arti keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial dan kebebasan untuk memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, namun dalam hal ini dibatasi oleh perlunya tanggung jawab.

#### **1.5.7 Larangan dalam ekonomi Islam**

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syari'ah, antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur<sup>7</sup> riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### **1.5.7.1 Riba**

Pengertian Riba secara etimologis riba adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*increase*), dan tambahan (*addtion*)<sup>8</sup> atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Hajj (22) : 5, Q.S. An-Nahl (16) : 92, Q.S. Ar-Rum (30) : 39, dan Q.S. Fushilat (41) : 39.

Dasar hukum pengharaman riba. Perintah-perintah untuk meninggalkan riba (bunga) dalam Al-Qur'an diturunkan secara bertahap

---

<sup>6</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, cet 4, 2007), hlm. 5

<sup>7</sup>Penjelasan pasal 2 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

<sup>8</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syari'ah : Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 158.

(gradatif). Tahapan tersebut<sup>9</sup> terdapat dalam surat-surat Al-Qur'an yaitu : Tahap pertama terdapat dalam Q.S. Ar-Rum (30): 39. Tahap Kedua terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4): 161. Tahap ketiga terdapat dalam Q.S. Ali-Imran (3): 130. Tahap keempat terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 275-276. Tahap kelima terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 278-279.

#### **1.5.7.2 Gharar**

Pengertian gharar secara etimologis berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan.<sup>10</sup> Menurut Yusuf Al-Subaili, *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Penyebab terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan. Dalil haramnya gharar ada beberapa hadits Rasulullah SAW, yang menjadi dalil haramnya *gharar*, yaitu sebagai berikut : Abu Hurairah Ra. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jualbeli hashah<sup>11</sup> dan jual beli *gharar*. (HR.Bukhari-Muslim).

#### **1.5.7.3 Maisir**

Pengertian maisir secara etimologis maisir yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja<sup>12</sup>. Judi dengan segala bentuknya dilarang dalam syari'ah Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki mudharat (dosa) lebih besar daripada

---

<sup>9</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1996, jilid 3), hlm. 76.

<sup>10</sup>Yusuf Al-Syubaili, *Fikih Perbankan Syari'ah : Pengantar Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Terj. Erwandi Tarmizi, (Tt, Dar Al-Qalam, Tth) hlm. 22.

<sup>11</sup>Jual beli dengan cara lempar batu.

<sup>12</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 20.

manfaatnya. Q.S. Al-Baqarah ayat 19 : Tahap kedua, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim yang sangat dibenci. Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 :

#### **1.5.7.4 Haram**

Barang yang diharamkan dilarang diperjualbelikan. Dalam Islam, barang haram diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu : haram karena zat (substansi) nya Hal ini bersumber kepada : Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) :173, Q.S. Al-Maidah (5) : 3, Q.S. Al-An'am (6): 145, Q.S. Al-An'am (6) : 118-121 dan Q.S. Al-Maidah (5) : 90-91. Barang yang diharamkan bukan karena zat (substansi) nya, tetapi karena cara memperolehnya dengan jalan yang diharamkan, seperti : mencuri, merampok, begal, menipu, menyuap dan korupsi. Hal ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti Q.S. Al-Maidah (5) : 38, Q.S. Al-Muthafifin (83) : 1-3 dan didalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 188.

#### **1.5.7.5 Zallim**

Secara etimologis, zalim mempunyai arti bertindak lalim, atau aniaya, mengurai, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil.<sup>13</sup> Secara terminologis, zalim yaitu transaksi yanag menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.<sup>14</sup> Hal ini

---

<sup>13</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta : Pesantren Krafyak, 1984), hlm. 946.

<sup>14</sup>Penjelasan Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti dalam surat Q.S. Al-An'am (6) : 152, Q.S. Asy-Syuara' (26) : 181-183, Q. S. Ar-Rahman (55) : 9, Q.S. An-Nisa (4) : 29, Q.S. Al-Baqarah (2) : 275-279.

## **2. METODE PENELITIAN**

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*). Fokus dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dalam hal program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata dalam bentuk tulisan dalam artian peneliti akan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta mengenai pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat sudut pandang ekonomi Islam di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan sekunder.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode *evaluatif*. peneliti akan menggambarkan tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah atau tidak.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Analisis Pengelolaan Dana Desa Melalui Pengelolaan BUMDes**

#### **3.1.1 Kepengurusan**

Pengamatan peneliti kepada Pengurus BUMDes sangat positif dan terbuka. Ditambah dengan mudahnya menemui seluruh Pengurus BUMDes yang dinilai akan berdampak dan suksesnya pengelolaan BUMDes sesuai dengan ekonomi syari'ah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam yaitu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan usaha yang

---

<sup>15</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1986), hlm. 55.

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syari'ah.

#### 3.1.2 Asas dan Tujuan

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yaitu jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dalam rangka menuntaskan persoalan kemiskinan, memberikan bantuan sosial dan sumbangsih ikhlas dan tulus di jalan Allah SWT, keadilan dalam kegiatan perekonomian, stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dalam mengangkat derajat manusia dari kehidupan terbelakang dalam segala aspek.

#### 3.1.3 Peminjam

Pengelolaan barang dan modal dengan perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan pemeliharaan, investasi perubahan status hukum barang BUMDes ditetapkan oleh pengurus setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina dengan penuh tanggung jawab, tidak mementingkan pribadi dan penuh pertimbangan. Hal ini sesuai dengan etika ekonomi Islam yaitu keseimbangan, tidak berlebihan-lebihan, keadilan distribusi, keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan sosial.

### **3.2 Analisis Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah**

#### 3.2.1 Unsur Riba

Pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes "Sejahtera" Desa Sindon jika diperhatikan jasa pinjaman nya sebesar 1,25% dan simpanan 0,25% setiap angsuran. Maka peneliti menganggap hal ini mengandung unsur riba. Karena mempunyai bunga yang cukup besar yaitu 1,5% setiap angsuran. Berarti jika dihitung maka besar bunga nya sebesar 18% per tahun.

#### 3.2.2 Unsur Gharar

Dari 4 responden dalam penelitian ini. Usaha dan barang yang dijual oleh responden jelas bentuk, objek, keberadaan, kualitas,

sifat, ukuran dan harga barangnya. Dalam hal ini sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena kejelasan objek dalam transaksi barang dan kejelasan keberadaan barang yang diperjual belikan.

#### 3.2.3 Unsur Maisir

Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dari 4 responden yang melakukan kegiatan perekonomian. Semua usaha-usaha dilakukan dengan kerja keras dan pengelolaan usaha yang baik. Dalam hal ini sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena usaha yang dijalankan tidak mengandung unsur judi, spekulasi yang tinggi, taruhan atau permainan beresiko.

#### 3.2.4 Unsur Haram

Dari 4 responden yang memanfaatkan BUMDes “Sejahtera” untuk pengembangan ekonomi. Usaha-usaha yang dikembangkan antara lain : ternak cacing, budidaya jamur, ternak bebek, jualan kelontong, jual snack, ternak puyuh dan jual kerupuk makroni goreng. Diantara barang-barang tersebut tidak ada barang/ternak yang haram karena zat (substansi) nya. Melainkan barang/ternak yang sering dikonsumsi dan dijumpai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ternak cacing yang masih menjadi kontroversi, peneliti menilai dalam budidaya cacing hukumnya mubah selagi digunakan dalam hal yang bermanfaat.

Barang yang diharamkan bukan karena zat (substansi) nya, tetapi karena cara memperolehnya dengan jalan yang diharmkan seperti : mencuri, merampok, begal, menipu, menyuap dan korupsi. Pengelolaan usaha yang dilakukan 4 responden, tidak ada tercantum haram dalam memperoleh barang dan ternak. karena semua barang/ternak dikembangkan



dan didapatkan dengan cara-cara baik dan tidak dilarang oleh prinsip ekonomi Islam.

#### 3.2.5 Unsur Kezaliman

Analisis peneliti dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh responden ditemukan unsur kezaliman dalam besaran bunga pinjam meminjam, karena bunga yang dikenakan kepada peminjam adalah 1,25% per setiap kali melakukan angsuran. Hal ini tentu perbuatan zalim karena bunga yang dikenakan mencapai 15% setiap tahun yang besarannya hampir sama dengan bunga bank konvensional. Akan tetapi dalam praktek pengelolaan usaha yang dikembangkan, seperti bertindak lalim dalam melakukan transaksi jual beli, menganiaya pembeli, menindas pembeli, bertindak sewenang-wenang dan bersikap tidak adil kepada pembeli. Dalam hal ini peneliti mengamati sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena para responden dalam melaksanakan usaha tidak mengurangi timbangan, tidak melakukan jual beli paksa, tidak memakan harta orang lain secara batil, tidak memakan harta riba dan tidak menimbun barang yang langka.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagian besar dibelanjakan untuk pengadaan infrastruktur Desa seperti : pembangunan gedung serbaguna, pembangunan jalan, pembuatan parit, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Hanya sebagian<sup>15</sup> kecil digunakan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam bentuk sosial ekonomi masyarakat yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Sejahtera" Desa Sindon menggunakan sistem simpan

pinjam secara konvensional bukan syari'ah. Karena setiap peminjam dana BUMDes dikenakan bunga sebesar 1,25% per bulan atau setiap kali angsuran. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah bunga pinjaman tersebut termasuk dalam kategori riba, hal ini juga tentu adanya unsur kezaliman karena besaran bunga yang mencapai 15% setiap tahun. Sehingga kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.

Sedangkan pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali melalui pinjaman dana di BUMDes "Sejahtera" Desa Sindon peneliti tidak menemukan unsur-unsur gharar, maisir, haram dan kezaliman dalam praktek jual beli barang-barang yang dikembangkan.

Hal ini serupa dengan model yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan mendirikan Grameen Bank atau Bank Desa yang mengembangkan konsep kredit mikro untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari Bank umum.

## **4.2 Saran**

### **4.2.1 BUMDes "Sejahtera" Desa Sindon**

- a. Seharusnya dalam pengelolaan BUMDes lebih ditingkatkan kinerja para pengurus yang tidak hanya memberikan modal usaha kepada masyarakat, tetapi mengupayakan usaha-usaha lain juga seperti pelayanan jasa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan tempat pelelangan ikan, pengembangan hasil industri, pengelolaan pariwisata dan lain-lain sesuai dengan program-program BUMDes.
- b. BUMDes "Sejahtera" hendaknya dikelola lebih serius dengan menambah gaji para pengurus. Sebab jika BUMDes dikelola dengan sangat serius maka budgetnya akan bertambah. Dengan demikian warga yang akan meminjam bertambah banyak, hal itu berdampak bertambahnya penghasilan Desa yang nantinya

dimanfaatkan dalam pembangunan Desa yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

#### 4.2.2 Peminjam BUMDes

- a. Bagi para peminjam hendaknya memanfaatkan dengan baik modal usaha yang telah diberikan. Karena jaminan dalam peminjaman di BUMDes hanya kepercayaan saja. Jika tidak dijaga dengan baik, maka tidak akan diberikan pinjaman untuk yang kedua kalinya.
- b. Dengan mudahnya meminjam modal usaha, hendaknya warga Desa Sindon memanfaatkan BUMDes untuk mengembangkan usaha-usaha yang produktif demi kesejahteraan ekonomi keluarga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hulwati. 2006, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : Ciputat Press
- Sri, Neni Imaniyati, 2013. *Perbankan Syari'ah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung : Mandar Maju
- Iska, Sukri. 2012. *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta : Fajar Media Press.
- Yusanto, M. Ismail dan Yunus, M.Arif. 2011. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor : Al-Azhar Press
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syari'ah : Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta : Kencana.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf.
- Syafei Antonio, Muhammad. 2005. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Ascarya,. 2007. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Warson Munawwir, Ahmad. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta : Pesantren Krafyak.